

ABSTRAK

Pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Salah satu tujuan dari pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu untuk meningkatkan pengadaan berkelanjutan, yang mana dalam hal ini merupakan sebuah tindak lanjut dari adanya deklarasi Stockholm untuk menjaga lingkungan demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat. Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 87 Tahun 2022. Namun dalam pelaksanaannya aturan ini tidak berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris hukum, serta menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan sosio legal dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerapan prinsip ramah lingkungan berkelanjutan pada pengadaan barang/jasa pemerintah Kota Surabaya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan ada beberapa kendala seperti, biaya yang mahal, ketersediaan produk yang sedikit, ketidaktahuan penyedia akan aturan yang telah diberlakukan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Kata kunci : pengadaan barang/jasa, ramah lingkungan, berkelanjutan

ABSTRACT

Procurement of government goods/services, namely procurement of goods/services by Ministries/Institutions/Regional Apparatuses financed by the APBN/APBD whose process starts from identification of needs, up to the handover of the work. One of the goals of government procurement of goods/services is to increase sustainable procurement, which in this case is a follow-up to the Stockholm declaration to protect the environment in order to create a healthy environment. The Surabaya City Government, in this case, issued Surabaya Mayor Regulation Number 87 of 2022. However, in practice this regulation did not work well due to several factors. The research method used in this study uses empirical research methods, and uses an approach method, namely the socio legal approach and statue approach. The results showed that the implementation of sustainable environmentally friendly principles in the procurement of goods/services for the Surabaya City government was not carried out properly due to several obstacles such as high costs, limited product availability, providers' ignorance of the rules that had been enforced, lack of supervision, and low public awareness of the importance of preserving the environment.

Keywords: procurement of goods/services, environmentally friendly, sustainable